

Bridging Knowledge, Policy, and Practice in Disaster-Responsive Social Welfare: An Institutional Framework from Cianjur, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.31595/biyan.v8i1.1795>

Muhamad Safii Nasution 1*

Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung
Indonesia Email: safii.nasution@kemsos.go.id

Journal History

Received: 2026-04-19

Accepted: 2026-08-21

ABSTRACT

This study examines the grand design of the role of Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) in social welfare services, particularly in disaster management in Cianjur. Disasters create multidimensional impacts, including physical, psychological, social, and economic problems, requiring an integrated and sustainable social service system. This research aims to analyze the role of Poltekesos and formulate a conceptual framework to strengthen its contribution within the social welfare system. The study uses a qualitative approach with a case study method, supported by observation, documentation, and literature review. The results show that Poltekesos has a strategic role in strengthening human resources, providing psychosocial support services, and bridging policy with field implementation. However, there are still challenges related to system integration, coordination, and operational readiness. The proposed grand design emphasizes strengthening institutional roles, improving coordination mechanisms, and developing adaptive service systems. This approach is expected to enhance the effectiveness, responsiveness, and sustainability of social welfare services in disaster situations, particularly for vulnerable groups.

KEYWORDS:

Social welfare; Poltekesos; disaster; vulnerable groups; social services

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya dan kegiatan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) dalam layanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan bencana di Kabupaten Cianjur. Bencana menimbulkan dampak multidimensional yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Poltekesos serta merumuskan kerangka konseptual untuk memperkuat kontribusinya dalam sistem kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Poltekesos memiliki peran strategis dalam penguatan sumber daya manusia, penyediaan layanan dukungan psikososial, serta sebagai penghubung antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Namun, masih terdapat kendala dalam integrasi sistem, koordinasi, dan kesiapan operasional. Grand design yang diusulkan menekankan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, serta pengembangan sistem layanan yang adaptif untuk meningkatkan efektivitas, responsivitas, dan keberlanjutan pelayanan kesejahteraan sosial dalam situasi bencana.

KataKunci:

Kesejahteraan sosial; Poltekesos; bencana; kelompok rentan; layanan sosial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana alam maupun sosial, yang disebabkan oleh kondisi geografis, geologis, dan demografinya. Peristiwa bencana seperti gempa bumi di Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat

fisik berupa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, tetapi juga meluas pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut seringkali menyebabkan terganggunya fungsi sosial individu dan komunitas, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang mampu merespons secara cepat, tepat, dan berkelanjutan dalam situasi krisis [1].

Konteks pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa Kementerian Sosial memiliki tiga pilar utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial, yang dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Ketiga pilar tersebut membentuk kerangka pelayanan yang komprehensif dan saling melengkapi dalam menangani kebutuhan masyarakat, baik dalam situasi normal maupun krisis. Perlindungan dan jaminan sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan risiko sosial, rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial individu, sementara pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang [2].

Kemensos juga berupaya memfasilitasi konsep kontekstual penanganan bencana berupa perlindungan sosial adaptif -atau Adaptive Social Protection (ASP). ASP merupakan pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim agar masyarakat, terutama kelompok rentan, mampu menghadapi guncangan (shocks) dan tekanan (stress) yang semakin sering terjadi. Konsep ini berkembang karena program perlindungan sosial tradisional sering kali hanya berfokus pada kemiskinan kronis, sementara masyarakat kini juga menghadapi bencana alam, pandemi, perubahan iklim, krisis pangan, dan guncangan ekonomi.

Menurut World Bank, Adaptive Social Protection adalah "Pendekatan yang membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat mempersiapkan diri, mengatasi, dan pulih dari berbagai guncangan melalui sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan responsif". Sedangkan menurut Food and Agriculture Organization (FAO), ASP merupakan integrasi antara Social Protection, dan Disaster Risk Reduction (DRR), serta Climate Change Adaptation (CCA). Tujuannya meningkatkan resiliensi (ketahanan) masyarakat.

Konsep ADP dibangun di atas 3 (tiga) pilar utama, yaitu *Social protection* atau perlindungan sosial, *Disaster risk reduction* atau pengurangan risiko bencana, dan *Climate change adaptation* -atau adaptasi perubahan iklim. Dalam hal ini *Disaster risk reduction* adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan tindakan yang bertujuan mengurangi risiko bencana sebelum bencana terjadi.

Dengan demikian ASP merupakan evolusi dari sistem perlindungan sosial konvensional menuju sistem yang lebih proaktif, fleksibel, dan tangguh. Dengan mengintegrasikan perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim, ASP tidak hanya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga mencegah mereka jatuh miskin ketika menghadapi berbagai guncangan. Dalam konteks perubahan iklim, pandemi, dan ketidakpastian ekonomi global, ASP menjadi salah satu strategi penting untuk membangun ketahanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi pelayanan bencana selama ini masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Permasalahan seperti belum optimalnya integrasi antar layanan, keterbatasan sumber daya manusia profesional, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama, khususnya dalam penanganan bencana. Kondisi ini menyebabkan pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem secara menyeluruh melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi layanan, serta pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan responsif [2].

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) sebagai institusi pendidikan vokasi di bawah Kementerian Sosial memiliki potensi strategis dalam mendukung penguatan sistem pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan, Poltekesos menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional di bidang pekerjaan sosial. Sementara itu, kegiatan penelitian berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan model pelayanan sosial, sedangkan pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana implementasi langsung dalam menjawab permasalahan sosial di lapangan [3].

Selain itu, Poltekesos juga berperan aktif dalam mendukung pelayanan sosial melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan lapangan, termasuk penanganan bencana. Keterlibatan dalam layanan dukungan psikososial menunjukkan bahwa Poltekesos memiliki kapasitas dalam memberikan intervensi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Hal ini memperkuat posisi Poltekesos tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam sistem pelayanan sosial nasional. Dengan demikian, potensi yang dimiliki memungkinkan Poltekesos untuk mengambil peran yang lebih luas dan terintegrasi dalam penguatan pelayanan kesejahteraan sosial [3].

Secara teoretis, pendekatan sistem pelayanan sosial menekankan bahwa efektivitas suatu layanan sangat bergantung pada integrasi antar komponen yang terlibat, seperti kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta mekanisme operasional. Keterpaduan antar komponen tersebut menjadi faktor kunci dalam memastikan pelayanan berjalan secara optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Tanpa adanya koordinasi yang baik, pelayanan sosial cenderung berjalan secara sektoral, sehingga menimbulkan tumpang tindih program, kesenjangan layanan, serta rendahnya efektivitas intervensi yang diberikan kepada masyarakat [4].

Selain itu, teori ekologi menegaskan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya, sehingga penanganan masalah sosial harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai level intervensi, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga institusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan sosial sangat ditentukan oleh sinergi antar aktor yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan penguatan hubungan antar lembaga menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pelayanan sosial yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi situasi kompleks seperti bencana [5].

Meskipun memiliki potensi yang besar, peran Poltekesos dalam sistem penanganan bencana nasional masih cenderung bersifat pendukung dan belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka kebijakan maupun operasional. Keterlibatan yang dilakukan selama ini lebih bersifat situasional dan belum menjadi bagian dari sistem yang terstruktur dalam penanganan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Poltekesos belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut mencerminkan adanya keterbatasan dalam penempatan peran kelembagaan secara strategis dalam mendukung efektivitas pelayanan sosial di tingkat nasional.

Selain itu, belum adanya mekanisme yang jelas dalam mobilisasi sumber daya manusia serta keterbatasan koordinasi dengan lembaga terkait menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran Poltekesos secara optimal. Ketidadaan desain yang komprehensif mengenai posisi, fungsi, dan peran Poltekesos dalam sistem pelayanan sosial menyebabkan kontribusinya belum terarah dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kelembagaan yang dimiliki dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kerangka strategis yang mampu mengintegrasikan peran Poltekesos secara sistemik dalam sistem penanganan bencana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Poltekesos dalam layanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan bencana di Kabupaten Cianjur. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi kontribusi Poltekesos dalam setiap tahapan pelayanan sosial serta keterkaitannya dengan sistem yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan grand design sebagai kerangka konseptual dalam memperkuat integrasi peran Poltekesos dalam sistem pelayanan sosial. Perumusan grand design diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai posisi, fungsi, serta mekanisme operasional Poltekesos dalam mendukung pelayanan sosial.

Grand design yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan arah strategis dalam pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara ilmiah maupun praktis, terutama dalam pengembangan model pelayanan sosial berbasis kelembagaan pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pelayanan sosial yang lebih efektif dan responsif, serta menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam peran Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) dalam layanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan bencana di Kabupaten Cianjur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara kontekstual dan komprehensif, terutama yang berkaitan dengan dinamika pelayanan sosial dan interaksi antar lembaga dalam situasi krisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas sosial yang kompleks serta mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan sosial [1].

Metode studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat mendukung analisis yang lebih relevan terhadap permasalahan penelitian. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi secara detail karakteristik penanganan bencana, keterlibatan berbagai aktor, serta dinamika pelayanan sosial yang terjadi. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih fokus dan kontekstual terhadap kasus gempa bumi di Kabupaten Cianjur, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan aplikatif dalam pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial (Adem et al., 2025).

Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai wilayah yang terdampak langsung gempa bumi dan menjadi representasi kondisi penanganan bencana di Indonesia. Selain itu, penelitian juga mengkaji peran Poltekesos sebagai institusi pendidikan yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan sosial. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan relevansi kasus serta ketersediaan data empiris yang mendukung analisis penelitian (Susilowati, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengalaman langsung dalam kegiatan penanganan bencana, termasuk keterlibatan dalam layanan sosial dan dukungan psikososial di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta literatur ilmiah

yang relevan dengan topik penelitian. Kombinasi kedua sumber data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis (Lestari et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi korban, situasi pengungsian, serta proses pelayanan sosial di lokasi bencana. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data berupa laporan kegiatan, foto, dan arsip yang berkaitan dengan penanganan bencana. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan memperkuat kerangka analisis penelitian. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan triangulatif (Aprianti & Hasanov, 2026).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bantuan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatness*). Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dalam pengembangan peran Poltekesos dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial [2]. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan grand design yang mencakup arah strategis, penguatan kelembagaan, serta integrasi sistem pelayanan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan (Zaidi, 2025).

HASIL

DAMPAK SOSIAL BENCANA DI KABUPATEN CIANJUR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas permasalahan sosial yang timbul akibat bencana. Dampak yang terjadi tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik berupa hancurnya infrastruktur dan korban jiwa, tetapi juga mencakup gangguan psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Banyak korban mengalami trauma, kehilangan anggota keluarga, serta terganggunya relasi sosial dalam komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial secara menyeluruh, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan (Huraerah et al., n.d.).

Data menunjukkan bahwa ribuan masyarakat terdampak bencana harus mengungsi dan kehilangan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperburuk situasi sosial masyarakat secara keseluruhan. Ketidakstabilan kondisi pengungsian, keterbatasan fasilitas, serta ketergantungan terhadap bantuan menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlangsungan hidup korban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlanjut menjadi permasalahan sosial yang lebih kompleks apabila tidak ditangani secara tepat (Prasetyo et al., 2025).

Kerentanan sosial semakin meningkat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi situasi krisis. Kelompok ini membutuhkan perhatian khusus karena memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap dampak bencana, baik secara fisik maupun psikososial. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan pentingnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang mampu merespons secara cepat, terpadu, dan adaptif. Sistem pelayanan yang efektif diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung proses pemulihan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Kajian dengan menggunakan analisis SWOT menghasilkan rumusan dalam tabel sebagai berikut.

Strength		Weakness	
1	Memiliki mandat khusus di bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial.	1	Jumlah dosen, mahasiswa, dan tenaga lapangan terbatas dibanding luas wilayah terdampak.
2	Memiliki tenaga ahli pekerjaan sosial yang memahami asesmen psikososial, manajemen kasus, dan rehabilitasi sosial.	2	Kewenangan operasional terbatas karena bukan instansi komando penanggulangan bencana.
3	Memiliki Unit Kajian dan Layanan Bencana serta pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kebencanaan.	3	Pendanaan kegiatan sering bergantung pada anggaran pemerintah atau proyek kerja sama.
4	Mahasiswa dapat diterjunkan sebagai relawan terlatih melalui kegiatan praktik lapangan.	4	Belum seluruh inovasi hasil penelitian terdokumentasi menjadi model nasional yang baku.
5	Jaringan kuat dengan Kementerian Sosial, Sentra Terpadu, TAGANA, dan pekerja sosial profesional.	5	Sistem monitoring dampak jangka panjang program pascabencana masih perlu diperkuat.
Opportunities		Threats	

1	Dukungan pemerintah terhadap penguatan ketangguhan masyarakat dan <i>Adaptive Social Protection</i> .	1	Tumpang tindih kewenangan antarinstansi dapat menghambat koordinasi.
2	Kesempatan menjadi pusat pelatihan nasional pekerja sosial kebencanaan.	2	Keterbatasan anggaran pemerintah dapat mengurangi keberlanjutan program.
3	Kerja sama dengan BNPB, BPBD, perguruan tinggi lain, NGO, UNDP, UNICEF, maupun lembaga donor internasional.	3	Pergantian kebijakan dan prioritas nasional dapat mengubah fokus program.
4	Pemanfaatan teknologi digital untuk asesmen cepat, pemetaan kerentanan, dan pendampingan psikososial.	4	Kejenjutan masyarakat dan relawan pada fase rehabilitasi jangka panjang.

Dari hasil analisis SWOT di atas dapat ditengarai bahwa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung memiliki posisi strategis dalam layanan bencana. Sebagai institusi pendidikan vokasi dan pusat pengembangan pekerjaan sosial, Poltekesos dapat berkontribusi signifikan dalam penanganan bencana, khususnya melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, asesmen psikososial, dan penguatan kapasitas masyarakat. Namun, efektivitas perannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang menekankan kolaborasi multipihak, inovasi berbasis teknologi, dan integrasi dengan pendekatan Disaster Risk Reduction (DRR) serta Adaptive Social Protection (ASP) akan memperkuat peran Poltekesos sebagai pusat unggulan (Center of Excellence) dalam pekerjaan sosial kebencanaan di Indonesia.

PELAYANAN SOSIAL DALAM PENANGANAN BENCANA

Tahap tanggap darurat menempatkan pelayanan sosial pada pemenuhan kebutuhan dasar korban sebagai prioritas utama. Intervensi yang dilakukan mencakup penyediaan logistik seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari, penyediaan tempat pengungsian yang layak, serta layanan dukungan psikososial bagi korban. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup korban sekaligus mengurangi dampak awal yang ditimbulkan oleh bencana. Layanan psikososial memiliki peran penting dalam membantu korban mengatasi trauma, memberikan rasa aman, serta mendukung stabilisasi kondisi emosional dalam situasi krisis yang penuh ketidakpastian (Hajar, 2025).

Kementerian Sosial bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, relawan, dan lembaga sosial lainnya, telah berupaya memberikan bantuan secara cepat dan terkoordinasi. Bantuan yang diberikan meliputi distribusi makanan, penyediaan tempat tinggal sementara, serta berbagai layanan sosial bagi masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam distribusi bantuan dan koordinasi antar lembaga. Beberapa wilayah belum mendapatkan bantuan secara merata, sementara keterlambatan distribusi terjadi akibat keterbatasan akses dan sistem koordinasi yang belum optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada korban.

Tahap rehabilitasi dan pemulihan menempatkan pelayanan sosial pada upaya mengembalikan fungsi sosial individu dan masyarakat yang terdampak bencana. Fokus utama diarahkan pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, serta kemampuan individu dalam menjalankan peran sosialnya. Pendampingan psikososial dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu korban mengatasi trauma, mengurangi tekanan emosional, serta membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri. Proses ini juga melibatkan penguatan relasi sosial dalam keluarga dan komunitas sebagai bagian dari pemulihan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, program pemberdayaan mulai diperkenalkan sebagai bagian dari strategi pemulihan jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat terdampak bencana. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi secara mandiri. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, serta penguatan kapasitas komunitas menjadi langkah penting dalam mendukung proses tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan bantuan darurat, tetapi perlu dilanjutkan dengan intervensi yang berorientasi pada pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak positif dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat mulai mampu mengakses kembali sumber penghidupan dan meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi situasi pascabencana. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, akses layanan yang belum merata, serta rendahnya kapasitas sebagian masyarakat dalam memanfaatkan program yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan desain program dan dukungan berkelanjutan agar pemberdayaan dapat berjalan secara lebih efektif dan inklusif.

PERAN POLTEKESOS DALAM PENANGANAN BENCANA

Peran Poltekesos dalam penanganan bencana menunjukkan kontribusi yang signifikan, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan pelaksanaan layanan dukungan psikososial. Keterlibatan Poltekesos tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup implementasi langsung di lapangan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dan dosen terlibat aktif dalam berbagai

kegiatan, seperti pendampingan korban, fasilitasi layanan sosial, serta dukungan terhadap kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa Poltekesos memiliki kapasitas yang kuat dalam mendukung sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara praktis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa Poltekesos berperan sebagai penguat sistem pelayanan sosial, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan siap terjun ke lapangan. Peran ini tidak hanya terlihat dari aspek pendidikan formal, tetapi juga dari keterlibatan langsung dalam kegiatan lapangan yang memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan penanganan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa Poltekesos memiliki kontribusi penting dalam menyiapkan tenaga profesional yang adaptif terhadap situasi krisis.

Selain itu, keterlibatan dosen dalam kegiatan pendampingan berbasis keilmuan turut memperkuat kualitas intervensi yang diberikan kepada masyarakat. Sinergi antara pendidikan dan praktik menciptakan hubungan yang saling mendukung antara pengembangan ilmu dan implementasi di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Poltekesos tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Dengan demikian, potensi yang dimiliki memungkinkan Poltekesos untuk dikembangkan sebagai bagian integral dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Poltekesos belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka penanganan bencana nasional. Keterlibatan yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari sistem yang terstruktur dalam kebijakan maupun operasional. Hal ini terlihat dari belum adanya pengaturan yang jelas terkait posisi dan fungsi Poltekesos dalam sistem pelayanan sosial, sehingga kontribusinya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kelembagaan yang dimiliki dengan implementasi peran di lapangan yang masih terbatas dan belum terkoordinasi secara menyeluruh.

Selain itu, keterbatasan mekanisme operasional juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi peran Poltekesos dalam penanganan bencana. Belum tersedianya sistem mobilisasi cepat sumber daya manusia, serta minimnya koordinasi formal dengan lembaga terkait, menyebabkan keterlibatan Poltekesos belum dapat dilakukan secara responsif dan terarah. Dampaknya, potensi yang dimiliki dalam pengembangan sumber daya manusia dan layanan sosial belum dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan penyusunan mekanisme yang lebih terstruktur untuk mendukung integrasi peran Poltekesos secara lebih efektif.

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN GRAND DESIGN PELAYANAN SOSIAL

Temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan grand design peran Poltekesos dalam layanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam konteks penanganan bencana. Grand design ini dipandang sebagai kerangka strategis yang mampu mengintegrasikan potensi kelembagaan Poltekesos ke dalam sistem pelayanan sosial secara lebih sistemik dan terarah. Keberadaan grand design menjadi penting untuk menjawab kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan implementasi di lapangan yang belum optimal. Dengan adanya kerangka yang jelas, peran Poltekesos dapat diarahkan secara lebih terstruktur sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam sistem pelayanan sosial.

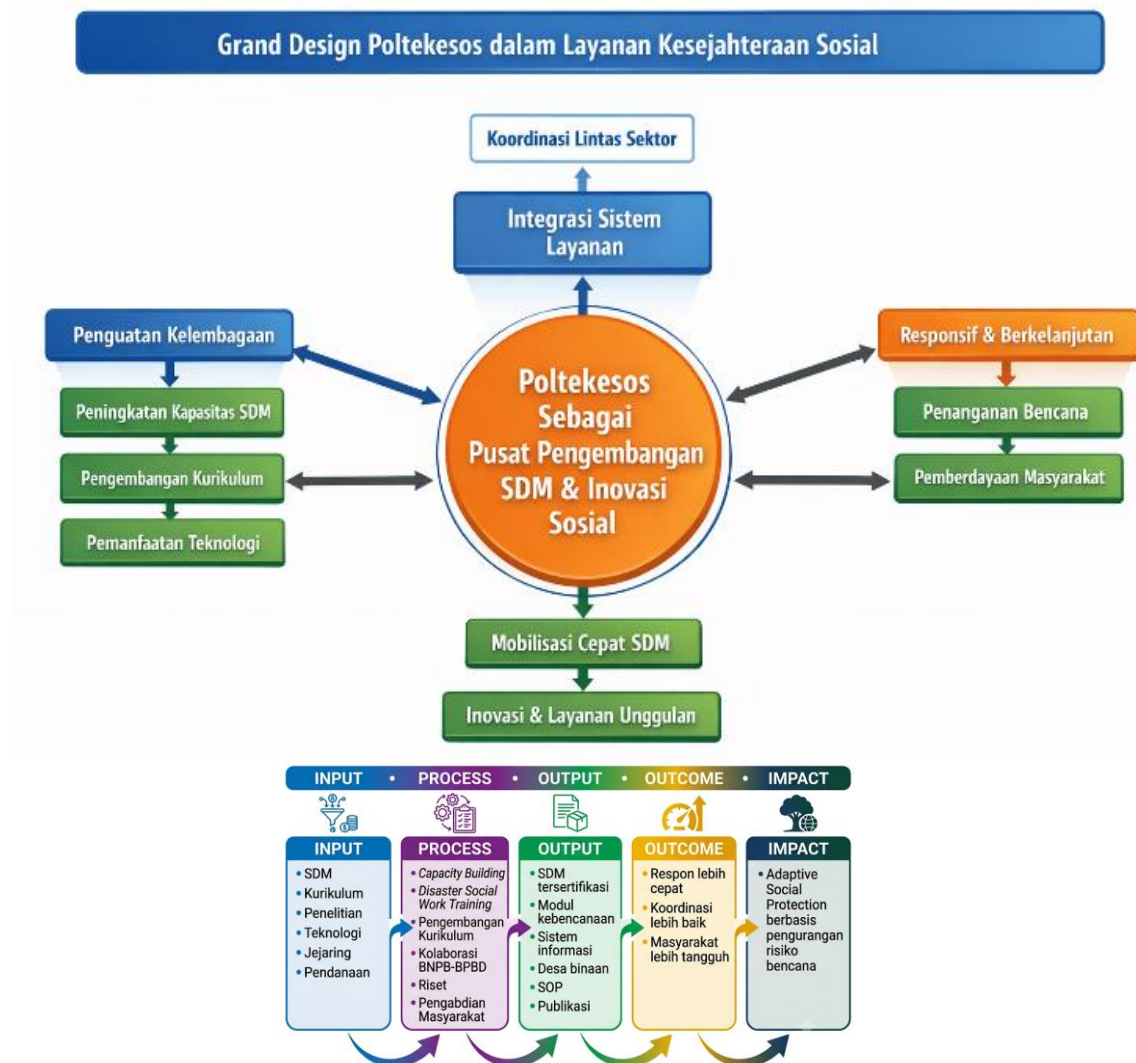
Pengembangan grand design tidak hanya berfokus pada aspek konseptual, tetapi juga mencakup penataan peran, fungsi, serta hubungan kelembagaan antara Poltekesos dengan berbagai pihak terkait. Hal ini meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, penyesuaian mekanisme operasional, serta integrasi dalam sistem kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, grand design diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat posisi Poltekesos sebagai bagian integral dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial nasional. Selain itu, kerangka ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan kualitas pelayanan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam situasi bencana.

Selain itu, grand design yang diusulkan mencakup penguatan kelembagaan, integrasi sistem pelayanan, serta pengembangan mekanisme operasional yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap situasi krisis. Penguatan kelembagaan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa Poltekesos memiliki posisi yang jelas dalam sistem pelayanan sosial, baik secara kebijakan maupun operasional. Integrasi sistem pelayanan juga diperlukan untuk menghubungkan berbagai komponen layanan agar dapat berjalan secara sinergis dan tidak terfragmentasi. Dengan adanya kerangka yang terstruktur, diharapkan pelayanan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat.

Penguatan tersebut juga meliputi pembentukan sistem mobilisasi sumber daya manusia yang lebih responsif, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan sosial. Sistem mobilisasi yang terstruktur memungkinkan keterlibatan tenaga profesional, mahasiswa, dan relawan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan tidak terjadinya tumpang tindih layanan serta meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Sinergi antar lembaga diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dan adaptif dalam menghadapi dinamika permasalahan sosial.

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan sosial juga menjadi komponen penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan. Penggunaan sistem informasi berbasis data dapat membantu dalam pemetaan

kebutuhan korban, distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Dengan adanya grand design tersebut, Poltekesos diharapkan mampu berperan secara lebih optimal sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan inovasi pelayanan sosial. Langkah ini menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas, responsivitas, dan keberlanjutan layanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan bencana dan situasi krisis lainnya.



Gambar 1: Grand Design Peran Poltekesos dalam Layanan Kesejahteraan Sosial

Gambar tersebut menggambarkan grand design peran Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial, yang menempatkan Poltekesos sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan inovasi layanan sosial. Posisi ini menunjukkan bahwa Poltekesos tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di lapangan. Dalam kerangka ini, Poltekesos berperan sebagai penguat sistem pelayanan sosial melalui kontribusinya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa penguatan peran Poltekesos dilakukan melalui beberapa komponen utama, yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi. Komponen-komponen ini menjadi dasar dalam membangun sistem pelayanan sosial yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap dinamika permasalahan sosial, khususnya dalam situasi bencana. Selain itu, integrasi sistem layanan dan koordinasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pelayanan sosial dapat berjalan secara efektif dan tidak terfragmentasi.

Sedangkan indikator kinerja dan target waktunya adalah sebagai berikut

Program	Indikator Kinerja	Target
Pelatihan SDM	Jumlah peserta	300 orang/tahun
Sertifikasi	Persentase lulusan tersertifikasi	≥80%
Kurikulum	Mata kuliah baru	2 mata kuliah
Penelitian	Publikasi kebencanaan	10 artikel/tahun
Pengabdian	Desa dampingan	15 desa
Penanganan bencana	Waktu mobilisasi	≤24 jam
Inovasi	Aplikasi digital	1 sistem nasional

Selanjutnya, grand design ini menekankan pentingnya mekanisme operasional yang responsif, seperti mobilisasi cepat sumber daya manusia dan pengembangan layanan unggulan berbasis kebutuhan masyarakat. Poltekesos melalui mahasiswa, dosen, dan tenaga profesional lainnya dapat berperan langsung dalam tim lapangan untuk memberikan layanan sosial, termasuk dukungan psikososial bagi korban bencana. Hal ini menunjukkan bahwa Poltekesos memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara langsung dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan. Pada akhirnya, grand design ini diarahkan untuk menghasilkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara Poltekesos, Kementerian Sosial, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pelayanan sosial dapat lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak bencana.

PEMBAHASAN

PERAN POLTEKESOS DALAM SISTEM PELAYANAN SOSIAL BENCANA

Dampak sosial bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur menunjukkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kerusakan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, serta korban jiwa menjadi dampak awal yang terlihat secara langsung. Namun, di balik itu, banyak korban mengalami trauma, kehilangan anggota keluarga, serta terganggunya relasi sosial dalam komunitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bencana memiliki dampak multidimensional yang memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan [7][8].

Selain itu, bencana juga menyebabkan meningkatnya kerentanan sosial, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Banyak dari mereka kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Situasi pengungsian yang tidak selalu memadai turut memperburuk kondisi tersebut, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun sosial. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan pentingnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang mampu merespons secara cepat, terpadu, dan adaptif dalam menghadapi berbagai dampak sosial yang muncul akibat bencana [9][10].

ANALISIS KESENJANGAN (GAP) DALAM SISTEM PELAYANAN

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas Poltekesos dengan perannya dalam sistem penanganan bencana nasional. Keterlibatan Poltekesos masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara sistemik dalam kebijakan maupun operasional. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta belum adanya mekanisme yang jelas dalam mobilisasi sumber daya manusia secara cepat saat terjadi bencana. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Poltekesos belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial, meskipun memiliki keunggulan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengalaman praktik lapangan [11][12].

Selain itu, fragmentasi dalam sistem pelayanan sosial menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi antar komponen layanan. Kondisi ini menyebabkan setiap lembaga cenderung bekerja secara parsial sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih program maupun kesenjangan dalam distribusi layanan. Dampaknya, respon terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana menjadi kurang efektif, terutama dalam situasi darurat yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat dalam sistem pelayanan sosial [13].

Kondisi tersebut menegaskan perlunya pendekatan yang lebih sistemik dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini harus mampu menghubungkan kebijakan, kelembagaan, serta mekanisme operasional secara menyeluruh agar tercipta sinergi antar komponen layanan. Integrasi yang kuat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan serta meningkatkan efektivitas intervensi sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sistem pelayanan sosial dapat berjalan secara lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai situasi krisis, khususnya bencana [14].

IMPLIKASI TEORETIS TERHADAP SISTEM PELAYANAN SOSIAL

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat integrasi antar komponen sistem, seperti kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Ketidakterpaduan antar elemen tersebut dapat menyebabkan layanan berjalan secara parsial dan kurang optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi bencana. Hal ini sejalan dengan teori sistem pelayanan sosial yang menekankan pentingnya koordinasi dan keterhubungan antar komponen dalam menciptakan layanan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan integrasi sistem menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial secara menyeluruh [4][15].

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pelayanan sosial perlu memperhatikan keterkaitan antara individu dan lingkungan sosialnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Teori ekologi menekankan bahwa kondisi individu sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sekitar, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, maupun institusi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penanganan masalah sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai level intervensi. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan sosial menjadi lebih kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara lebih tepat [5].

Dalam konteks tersebut, Poltekesos dapat diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pelayanan sosial yang berperan dalam memperkuat hubungan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Peran ini menjadi penting dalam menjembatani kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan praktik pelayanan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan keterlibatan yang lebih terstruktur, Poltekesos dapat mendukung terciptanya layanan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara keseluruhan [16].

GRAND DESIGN SEBAGAI SOLUSI STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis, pengembangan grand design menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Grand design yang diusulkan menempatkan Poltekesos sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan inovasi pelayanan sosial yang terintegrasi. Posisi ini menunjukkan bahwa Poltekesos tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memperkuat sistem pelayanan sosial secara nasional. Dengan adanya grand design, arah pengembangan peran Poltekesos menjadi lebih jelas, sehingga mampu meningkatkan kontribusi kelembagaan dalam mendukung efektivitas pelayanan sosial di berbagai situasi, termasuk bencana [6].

Selain itu, grand design memberikan kerangka yang sistemik dan terstruktur dalam menghubungkan potensi kelembagaan dengan implementasi layanan di lapangan. Integrasi antara pendidikan, penelitian, dan praktik pelayanan sosial menjadi landasan dalam memperkuat kapasitas Poltekesos sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan program. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang selama ini terjadi serta meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan sosial. Dengan demikian, grand design tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan [17].

Grand design yang dikembangkan mencakup penguatan sistem koordinasi antar lembaga, pengembangan mekanisme mobilisasi cepat sumber daya manusia, serta integrasi layanan sosial berbasis teknologi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, responsivitas, dan keberlanjutan pelayanan sosial, khususnya dalam situasi bencana. Konsep ini sejalan dengan pendekatan pengembangan sosial yang menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan dan praktik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, grand design tidak hanya menjadi kerangka konseptual, tetapi juga memiliki nilai implementatif dalam memperkuat sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh [6][18].

IMPLIKASI PRAKTIS BAGI PELAYANAN SOSIAL

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan bencana. Penguatan peran lembaga pendidikan seperti Poltekesos menjadi hal yang krusial, tidak hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem operasional pelayanan sosial. Keterlibatan yang lebih formal dan terstruktur dalam kebijakan serta implementasi di lapangan akan meningkatkan efektivitas kontribusi Poltekesos. Dengan demikian, peran Poltekesos dapat dioptimalkan sebagai penghubung antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata dalam pelayanan sosial di masyarakat [2][6].

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan praktik lapangan menjadi faktor kunci dalam menghadapi situasi krisis yang kompleks. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesional dan kesiapan lapangan akan mampu memberikan respon yang lebih cepat dan tepat dalam penanganan bencana. Penguatan kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara keseluruhan [2].

Penguatan koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk memastikan layanan berjalan secara efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. Integrasi antar komponen layanan akan mendukung terciptanya sistem pelayanan sosial yang responsif dan adaptif terhadap dinamika bencana. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Oleh karena itu, grand design yang diusulkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan ketepatan sasaran pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia [6][18].

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur menimbulkan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga mencakup pemulihan dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Meskipun telah terdapat kerangka pelayanan yang komprehensif, masih ditemukan kesenjangan dalam integrasi sistem, khususnya dalam optimalisasi peran lembaga pendidikan seperti Poltekesos dalam mendukung implementasi layanan di lapangan.

Poltekesos memiliki potensi strategis sebagai penguat sistem pelayanan kesejahteraan sosial melalui pengembangan sumber daya manusia, pengalaman praktik lapangan, serta kontribusi dalam layanan dukungan psikososial. Namun demikian, peran tersebut belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka penanganan bencana nasional. Oleh karena itu, pengembangan grand design menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan peran Poltekesos secara lebih terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan koordinasi pelayanan sosial.

Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Sosial perlu mengintegrasikan Poltekesos secara formal dalam sistem penanganan bencana nasional, khususnya dalam aspek perlindungan dan jaminan sosial. Kedua, perlu dikembangkan kebijakan yang mendukung pembentukan mekanisme mobilisasi cepat sumber daya manusia berbasis Poltekesos, termasuk mahasiswa dan tenaga profesional sebagai bagian dari tim respon bencana. Ketiga, diperlukan penguatan sistem koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat guna menghindari fragmentasi layanan.

Selain itu, kebijakan juga perlu diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis bencana, serta sertifikasi kompetensi pekerja sosial. Pengembangan sistem pelayanan sosial berbasis teknologi, seperti database terpadu dan sistem informasi respon bencana, juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan. Dengan implementasi kebijakan tersebut, diharapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai situasi krisis.

REFERENCES

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Laporan penanganan gempa bumi Cianjur*.
- Adem, E., Rifat, K., & Dogukan, O. (2025). Religious Pluralism and Social Boundaries: A Qualitative Study of {Sunni-Alevi} Interaction in Eastern Anatolia's Bayburt Province. *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1(3), 69–86.
- Aprianti, R., & Hasanov, R. (2026). The semiotics of divinity and resilience: Deciphering disaster mitigation wisdom in the vernacular architecture of Ghumah Baghi. *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 2(2), 277–296.
- Hajar, I. (2025). The History of Islamic Trading Civilization in the Pre-Prophetic Period (570–610 CE): Foundations of Economic and Ethical Practice. *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1(4), 160–171.
- Huraerah, A., Susilowati, E., Rusmana, A., Kurniasih, N., & ... (n.d.). The Principles of Justice in the Application of National Health Insurance Program for the Poor People in Indonesia. *Migration ...*. https://www.researchgate.net/profile/Ellya-Susilowati/publication/379446383_Migration_Letters_The_Principles_of_Justice_in_the_Application_of_National_Health_Insurance_Program_for_the_Poor_People_in_Indonesia/links/6609ea4b390c214cfd2cdffe/Migration-Letters-The-Principles-of-Justice-in-the-Application-of-National-Health-Insurance-Program-for-the-Poor-People-in-Indonesia.pdf
- Lestari, H., Firmansyah, R. Y., & Hassan, S. I. S. (2025). Challenging Epistemic Hegemony: Islam, Memory, and the Struggle over Southeast Asian History. *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1(4), 236–254.
- Prasetyo, D., Salleh, M. A., Al-Fayez, Y., & van Leeuwen, T. (2025). Civilising Mission or Colonial Experiment? Unmasking the Dutch Ethical Policy in Indonesia. *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1(4), 218–235.
- Susilowati, E. (2025). Integrating Islamic Values, Child Rights, and Policies in Caring for Neglected Children. *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 2(1), 14–32.
- Zaidi, M. N. Bin. (2025). Reconstructing "True Convivencia": The Roles of Muwalladun Mozarab and Jews in Coexistence in Al-Andalus During the Golden Age of Umayyad and First Taifa Periods. *Senarai:*

- Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1(3), 114–126.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman penyelenggaraan kesejahteraan sosial*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman layanan dukungan psikososial dalam penanganan bencana*.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage Publications.
- Nugraha, H., & Pratama, R. (2023). Social vulnerability and disaster response in Indonesia: Lessons from recent disasters. *Journal of Social Policy and Human Services*, 15(2), 45–60.
- Payne, M. (2014). *Modern social work theory* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. (2024). *Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat*.
- Putri, D., & Handayani, S. (2022). Institutional coordination in disaster management in Indonesia. *Journal of Disaster Studies*, 18(1), 23–35.
- Rahman, A., & Sakurai, A. (2021). Disaster risk reduction and community resilience in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52, Article 101988. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101988>
- Wijaya, A., & Saputra, R. (2023). Integrated social service systems in disaster response: Challenges and opportunities. *International Journal of Social Welfare*, 32(2), 210–222. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12567>